

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN PRINSIP KETERBUKAAN PERDAGANGAN SAHAM DI PASAR MODAL

Yeni Andriyani

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan sanksi administrasi dalam pelanggaran prinsip keterbukaan di pasar modal, serta mengetahui dan menganalisis kewenangan Bapepam dalam menerapkan sanksi administrasi bagi pelanggaran prinsip keterbukaan di pasar modal. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tanggung jawab hukum. Konsep tanggung jawab hukum adalah berhubungan dengan konsep kewajiban hukum. Bahwa seorang bertanggung jawab hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memiliki tanggung jawab hukum berarti ia bertanggung jawab atas suatu sanksi yang ditujukan langsung kepadanya.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang mencakup asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.

Hasil penelitian ini dirumuskan bahwa ketentuan sanksi administrasi dalam pelanggaran prinsip keterbukaan di pasar modal merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum bagi si pelaku dan juga sebagai usaha untuk mempertahankan citra pasar modal sebagai perdagangan yang lebih mengutamakan unsur kepercayaan. Kewenangan Bapepam dalam menerapkan sanksi administrasi bagi pelanggaran prinsip keterbukaan di pasar modal merupakan suatu bentuk penegakan hukum sehingga pihak-pihak yang terlibat di dalam perdagangan saham di pasar modal merasa aman dan terjamin.

Saran yang diberikan adalah perseroan sebagai badan hukum harus mempunyai kekayaan sendiri, ada pemegang saham sebagai pemasok modal yang tanggung jawabnya tidak melebihi dari nilai saham yang diambilnya (modal yang disetor) dan harus ada pengurus yang terorganisir guna mewakili perseroan dalam menjalankan aktivitasnya dalam lalu lintas hukum di luar maupun di dalam pengadilan dan tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap perikatan-perikatan yang dibuat oleh perseroan terbatas.

Kata Kunci : keterbukaan

APPLICATION OF ADMINISTRATIVE SANCTIONS AGAINST VIOLATIONS OF THE PRINCIPLE OF TRANSPARENCY TRADING IN CAPITAL MARKET

Yeni Andriyani

Abstract

This study was conducted to determine and analyze the provisions of the administrative sanctions in violation of the principle of transparency in the capital markets, as well as identify and analyze the authority of Bapepam in applying administrative sanctions for violation of the principle of transparency in the capital market. The theory used in this research is the theory of legal liability. The concept of legal responsibility is related to the concept of legal obligations. That a responsible law for a certain action or that he bears legal responsibility means that he is responsible for any sanctions aimed directly at him. The method used is a normative legal research methods that include principles of law, the systematic study of the law, a study of the level of vertical and horizontal synchronization.

Results of this study was formulated that the provisions of the administrative sanctions in violation of the principle of transparency in the capital market is a form of legal liability for the perpetrator as well as an effort to maintain the image of the capital market as a trading prefers the element of trust. Bapepam authority in applying administrative sanctions for violation of the principle of transparency in the capital market is a form of law enforcement so that the parties involved in the trading of shares in the capital market to feel safe and secure. Advice given is the company as a legal entity must have a wealth of its own, existing shareholders as a supplier of capital whose responsibilities do not exceed the value of the shares taken (paid-in capital) and there should be a committee organized to represent the company in carrying out its activities in traffic law outside and inside the court and not the personal responsibility of the engagement-engagement made by a limited liability company.

Keywords: openness